

# BaKTI Highlights Januari-Maret 2018

## Kegiatan Pertukaran Pengetahuan

### Events

Jumlah peserta yang hadir pada event yang dilaksanakan di kantor BaKTI untuk periode Januari -Maret 2018 adalah 462 orang terdiri dari 210 Laki-laki dan 252 perempuan dengan jumlah event sebanyak 15 event. Event-event ini dilaksanakan oleh BaKTI dan juga mitra BaKTI:

### Musrenbang Kelurahan Kunjungmae

Mengawali tahun 2018, Kelurahan Kunjungmae Kecamatan Mariso Kota Makassar melaksanakan Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, bertempat di Kantor BaKTI Makassar (13/1). Tujuan musyawarah ini untuk mendengarkan usulan warga dari tingkat RT/RW untuk dirangkum menjadi usulan pembangunan di tingkat kelurahan yang mencakup kegiatan lingkungan, sosial dan ekonomi yang diharapkan menjadi prioritas pembangunan di kelurahan pada tahun 2019. Hadir sebagai narasumber yakni Bappeda Kota Makassar, Camat Mariso dan Lurah Kunjungmae. Kegiatan ini dihadiri oleh 45 orang berasal dari RT/RW se kelurahan Kunjungmae, Puskesmas dan Babinkamtibmas di wilayah ini.

### Diskusi Inspirasi BaKTI “Mallsampah – Layanan Pengelolaan Sampah Online”

Sebagai lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, BaKTI kembali mengadakan Diskusi Inspirasi BaKTI dengan mengangkat topik Mallsampah – Layanan pengelolaan sampah online (9/2). Adi Saifullah Putra, CEO dan Founder Mallsampah hadir sebagai narasumber. Acara ini dipandu oleh moderator Luna Vidya. Mallsampah adalah layanan pengelolaan sampah online yang berdiri tahun 2015 dan menggunakan sistem bagi hasil. Mallsampah ini mempunyai visi untuk meningkatkan proses daur ulang sampah dari sekitar 10% di Indonesia menjadi 20-30% tiap tahunnya. Motor penggerak Mallsampah adalah para Pengepul dan Pemulung yang saat ini berjumlah sekitar 100 orang. Diskusi Inspirasi BaKTI kali ini juga mempertemukan narasumber dengan peserta strategis yaitu dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Polman, Bank Sampah dan juga komunitas pemulung di kota Makassar yang meminta Adi untuk hadir dan berbagi pengetahuan di tempat mereka.

Diskusi dihadiri oleh 53 orang peserta terdiri dari 27 orang Laki-laki dan 26 orang perempuan berasal dari NGO/CSO di Makassar, media, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas.

### Workshop Laboratorium Inovasi Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar saat ini sedang giat-giatnya mengembangkan pelayanan publik yang inovatif di semua sektor. Inovasi-inovasi ini dilaksanakan oleh masing-masing OPD (*Organisasi Perangkat Daerah*). Sejalan dengan semangat berinovasi kota Makassar, maka dipandang perlu adanya wadah seperti laboratorium inovasi yang bisa merekatkan OPD di Kota Makassar dalam

menggagas inovasi yang berbasis kebutuhan warga. Laboratorium Inovasi adalah sebuah wadah bagi ide-ide kreatif OPD terkait penyelesaian masalah pelayanan publik didiskusikan bersama, menemukan solusi dengan melibatkan multi pihak termasuk masyarakat (*co design and co create*), melakukan proses *testing* dan *prototyping*, inkubasi, dan uji coba bersama-sama.

Sebagai langkah awal pembentukan Lab Inovasi, selama dua hari di tanggal 7 dan 8 Maret 2018 diadakan workshop penggagasan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) kerja sama dengan Yayasan BaKTI dan didukung oleh UNDP (United Nation Development Program). Workshop ini bertujuan untuk mengidentifikasi inisiatif inovatif apa yang telah dilaksanakan oleh berbagai OPD Kota Makassar, bagaimana pandangan OPD terkait inisiatif tersebut, bagaimana proses untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi tersebut (termasuk keterlibatan publik), apa kebutuhannya serta mengidentifikasi kebutuhan akan Lab Inovasi.

Kegiatan dilaksanakan selama dua hari di kantor BaKTI dengan dihadiri oleh 49 peserta di hari pertama (Laki-laki: 37 dan Perempuan: 20) dan 54 peserta di hari ke dua (Laki-laki: 34, Perempuan: 20). OPD yang hadir diantaranya adalah perwakilan dari Balitbangda, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Camat, RSUD, Disnaker, Dinas PU, dan beberapa OPD lain.

Ke depan Lab inovasi ini akan memfasilitasi diskusi-diskusi diantara pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk menjadi mitra dalam menyelesaikan tantangan pembangunan. Peserta juga melakukan *stock taking* atau membuat daftar inovasi yang sedang dijalankan di kota Makassar serta mengidentifikasi *gap* (hambatan) yang ada saat ini.

Di akhir workshop disepakati bahwa Laboratorium Inovasi perlu untuk dirancang dan dibentuk dimana dan Badan Penelitian dan Pengembangan kota Makassar sebagai *leading sector*. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah lab inovasi merupakan wadah untuk mendiskusikan gagasan – gagasan, melaksanakan inkubasi, *test* dan *prototyping*, uji coba bersama-sama, perlunya pemahaman dan sosialisasi terkait arti pentingnya lab inovasi, pentingnya keterlibatan aktif stakeholder, anggaran dan komitmen dari pemerintah kota Makassar sendiri serta payung hukum yang bisa memastikan keberlanjutan lab inovasi. Workshop lanjutan dilaksanakan pada bulan April 2018 untuk mendiskusikan bersama Laboratorium Inovasi seperti apa yang akan dikembangkan dan hal-hal apa yang perlu dipersiapkan.

### **Information Help Desk**

Selama periode Januari - Maret 2018, BaKTI melayani permintaan informasi:

- Permintaan dari USAID Indonesia-MESP Program untuk menjawab pertanyaan assessment kondisi dan status CSO di Indonesia
- Permintaan dari Program TRANSFORMASI-GIZ untuk mendukung acara Launching Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Sulawesi Selatan
- Permintaan dari Kementerian Desa untuk kontak detail Bumdes yang kelola listrik di level komunitas
- Permintaan dari Bappeda Sulsel untuk contact mitra internasional di Sulsel untuk diundang ke Musrenbang Prov Sulsel

Jika anda memiliki pertanyaan seperti informasi *contact person*, dokumen pembangunan KTI, event, atau program pembangunan KTI, silahkan email ke: [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

## Praktik Cerdas

### • Pencarian Praktik Cerdas 2018

Tahun ini pencarian Praktik Cerdas 2018 kembali dibuka. BaKTI mengundang individu, lembaga, pemerintah daerah, program donor, kelompok masyarakat untuk memasukkan inisiatif cerdas yang mereka lakukan dalam menjawab tantangan pembangunan.



### • Update Praktik Cerdas

#### 1. Malaria Center di Halmahera Selatan

Program LaCaK Malaria memenangkan penghargaan yang diinisiasi oleh PBB di Swiss. LaCaK Malaria berhasil menyisihkan 700 peserta dari berbagai negara untuk kategori e-Health dan memenangkan WSIS (World Summit on the Information Society) Prizes 2018. LaCaK" atau Lapor Cepat adalah sistem pelaporan cepat kasus malaria. Sistem ini memanfaatkan layanan telekomunikasi selular yang saat ini telah mencakup banyak desa di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sistem LaCaK ini menggunakan UMB (UUSD Menu Browser, USSD = Unstructured Service Supplementary Data). USSD itu sendiri adalah teknologi GSM yang sering digunakan sebagai akses layanan tambahan.

#### 2. Pertanian Alami Salassae

- Kunjungan Staf Kepresidenan Republik Indonesia bersama Staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bupati Bulukumba serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Holtikultura dan Perkebunan ke Desa Salassae (19/2). Kunjungan ini sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap praktik pertanian alami yang dikembangkan Salassae, upaya mendorong penyebar luasan praktik cerdas ini khususnya di kabupaten Bulukumba serta mendukung program nasional kedaulatan pangan sebagai salah satu Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo.
- Pertanian alami menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SMA Negeri 14 Kabupaten Bulukumba. Pertemuan yang direncanakan berlangsung selama 20 kali

terdiri dari teori dan praktik. Selain itu, siswa juga didorong untuk bersama-sama merumuskan rencana capaian pengembangan kapasitas siswa mata pelajaran pertanian alami.



- Desa Salassae menerima beberapa kunjungan belajar dari berbagai daerah baik dari kabupaten Bulukumba sendiri maupun dari kabupaten lain seperti kelompok tani Luwu Utara, Jeneponto, Gowa, Studi Banding 21 orang Kelompok Tani Kabupaten Soppeng yang didampingi oleh Yayasan Matepe. Selain itu beberapa kali menerima kunjungan belajar dari mahasiswa dan pelajar seperti Studi Tour Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sibatua Pangkep.

## Jaringan Pertukaran Pengetahuan

### Kegiatan Sahabat BaKTI

Pada rentan waktu Januari-Maret 2018, perpustakaan BaKTI melakukan dua kegiatan yakni:

1. Kelas Sharing Diskusi Buku **“Upaya Penambahan Nilai Pada Pohon-Pohon Milik Petani Hutan”** yang dilaksanakan 6 Februari lalu di Perpustakaan BaKTI. Kegiatan dihadiri 28 orang peserta terdiri dari 13 perempuan dan 15 laki-laki. Hadir sebagai narasumber Bapak Achmad Rizal, Ibu Nur Hayati dan Ibu Nurhaedah. Ketiganya merupakan peneliti dari Balai Litbang LHK Makassar. Para nara sumber memberikan gambaran umum buku ini per bab nya, juga menceritakan pengalaman mereka selama meneliti di Hutan Rakyat Kabupaten Bulukumba.



## 2. Kelas Craft Anak

Sebagai lembaga yang peduli dengan isu anak, Perpustakaan BaKTI secara rutin melaksanakan kegiatan kreatif untuk anak-anak terutama terkait keterampilan. Pada tanggal 28 Maret 2018 diadakan kelas craft yang dihadiri sejumlah anak. Kelas craft ini bertujuan untuk mengasah keterampilan, kesabaran dan ketelitian anak dengan membuat mainan nenek sihir dan sapu terbang dari bahan-bahan bekas (recycled).



Berikut testimoni salah satu pengunjung Perpustakaan BaKTI:

*"Perpustakaan BaKTI menurut saya sangat bagus. Saya belum pernah menjumpai perpustakaan dengan komputer dan internet yang bebas pakai dan buku-buku bagus selain di Perpustakaan BaKTI. Suasana di perpustakaan ini sangat nyaman. Harapan saya untuk BaKTI agar perpustakaan ini menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda kreatif dan jadi ajang bertukar ilmu dan pengalaman."*

*Ferdiansyah Samira (Sahabat BaKTI/Mahasiswa)*

Jika anda memiliki materi publikasi yang dapat mendukung BaKTI dalam meningkatkan pertukaran pengetahuan yang ingin didisplay di perpustakaan kami, silakan kirimkan ke alamat berikut ini:

### **Yayasan BaKTI**

Jl. H.A.Mappanyukki No. 32, Makassar 90125

Phone: + 62 411 832228/833383

Contact Person: Indina Isbach (Librarian)

**Selama bulan Januari – Maret 2018, jumlah pengunjung Fasilitas BaKTI adalah sebanyak 468 orang, yang terdiri atas pengunjung laki-laki 401 dan pengunjung perempuan sebanyak 67.**

Dari total jumlah tersebut, sebanyak 338 adalah pengguna perpustakaan/galeri pengetahuan dan 130 berkunjung untuk mengakses internet. Jumlah buku 4.318. Dalam dua bulan ini pula kami menerima publikasi sebanyak 62 exemplar (buku, buletin, brosur, CD, laporan dan modul) dari mitra BaKTI.

**Total jumlah Sahabat BaKTI per 31 Maret 2018 adalah sebanyak 1.875 anggota, dari jumlah tersebut anggota laki-laki sebanyak 1.066 dan anggota perempuan sebanyak 809.** Anggota Sahabat BaKTI datang dari berbagai unsur seperti NGO, Mahasiswa, Swasta, Pelajar, Akademisi, media, pemerintah dan lainnya. **Mailing List** Sahabat BaKTI dimoderasi oleh BaKTI dan secara regular BaKTI membagikan informasi dan pengetahuan seperti beasiswa, peluang, artikel pembangunan, event-event menarik dan lowongan kerja bidang pembangunan selain itu anggota juga berbagi informasinya melalui milist ini.

## **Media pertukaran Pengetahuan**

### **BaKTINews**

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Download BaKTINews Edisi 144 | Januari - Februari pada link berikut

<http://bakti.or.id/bakti-news/baktinews-144-januari-februari-2018>

Download BaKTINews Edisi 145 | Februari – Maret pada link berikut

<http://bakti.or.id/bakti-news/baktinews-145-februari-maret>

Download BaKTINews Edisi 146 | Maret - April pada link berikut  
<http://bakti.or.id/bakti-news/baktinews-146-maret-april-2018>

Download BaKTINews Edisi 147 | April – Mei pada link berikut  
<http://bakti.or.id/bakti-news/baktinews-147-april-mei-2018>

Anda dapat memilih edisi BaKTINews favorit Anda dan mengunduh versi elektroniknya di  
<http://www.bakti.or.id/baktinews>

Untuk berlangganan BaKTINews, hubungi kami melalui email [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

### **Baca artikel dan unduh referensi terbaru di batukarinfo.com**

Artikel dan referensi terbaru dari program pembangunan di kawasan timur Indonesia yang kami hadirkan untuk Anda sepanjang Januari - Maret antara lain adalah sebagai berikut.

### **Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Yang Pertama Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan**

Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat hari ini menyelenggarakan acara Konsultasi Publik terkait Rancangan/Draf Peraturan Daerah (Raperdasi) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua Barat bertempat di Kota Sorong. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta mendapatkan masukan dan tanggapan terkait Rancangan Perdasai Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan Daerah Papua Barat yang sedang disusun. Kegiatan serupa juga telah diselenggarakan di Manokwari pada hari Selasa lalu. Adapun sebagai bentuk kelanjutan dari kegiatan ini, pemerintah provinsi akan menerima masukan terhadap Raperdasi sampai dengan akhir bulan April 2018.

<http://www.batukarinfo.com/node/34470>

### **Prosesi Adat Kepo' Tandai Serah Terima Program KIAT Guru di Manggarai Timur**

Emilia Danus, Kader Desa Rondo Woing tak henti-hentinya menghapus air mata. Kakinya seakan tak kuasa menopang rasa haru yang menyelimuti hatinya. Untaian kalimat perpisahan yang dilantunkan Ibu Rustanty Dewi, Koordinator Lapangan (KL) Program Kinerja dan Akuntabilitas (KIAT Guru) Kabupaten Manggarai Timur, membawanya pada kenangan selama setahun lebih berjuang bersama masyarakat, pemerintah desa dan sekolah untuk perbaikan pendidikan di desanya.

<http://www.batukarinfo.com/kiat-guru/news/prosesi-adat-kepo%E2%80%99-tandai-serah-terima-program-kiat-guru-di-manggarai-timur>

### **Camat Rana Mese Manggarai Timur Perkuat Monitoring Pasca KIAT Guru**

“Saya akan memperkuat monitoring ke desa-desa dan memaksimalkan peran Pengawas untuk memantau perkembangan pendidikan di sekolah-sekolah dampingan KIAT Guru.” Demikian janji Ir. Vincentius Joni, MMA, Camat Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur yang disampaikan

kepada BaKTI di sela-sela Pelatihan Tatakelola KIAT Guru bagi pemangku kepentingan se kabupaten Manggarai Timur (14/3).

<http://www.batukarinfo.com/kiat-guru/cerita-lapangan/camat-rana-mese-perkuat-monitoring-pasca-kiat-guru>

### Modul Pelatihan Analis Kebijakan



KSI memberikan dukungan kepada Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN) dalam menyusun Modul Pelatihan Analis Kebijakan. Modul ini telah dicetak dan diperbanyak kemudian dibagikan ke semua peserta pilot project Training of Trainers (ToT) Oktober lalu. Beberapa materi yang didapat ketika pelatihan di University of Melbourne juga dimuat, antara lain case study methods dan stakeholder mapping.

<http://www.batukarinfo.com/referensi/modul-pelatihan-analis-kebijakan>

### Program yang Dikelola BaKTI Program MAMPU



Mentoring dan *Technical Assistance* (TA) ke Mitra Daerah, tujuannya adalah untuk memberikan asistensi kepada mitra daerah terkait dengan program MAMPU tahun 2018 di Ambon, Kendari dan Lombok Timur Tana Toraja dan Parepare

- Mentoring dan *Technical Assistance* (TA) ke Mitra Daerah, tujuan untuk memberikan asistensi kepada mitra daerah terkait dengan program di Tana Toraja dan Parepare
- Proses dokumentasi film reses partisipatif di Parepare dan Maros pada tanggal 25 Februari lalu. Kegiatan ini bermaksud untuk mendokumentasikan gambar yang terkait proses reses partisipatif yang dilakukan anggota DPRD di Parepare dan Maros. Proses ini dilakukan dengan mewawancarai anggota DPRD yang melaksanakan reses dan perwakilan kelompok konstituen.
- Pembahasan draft Mou SPPT-SPPKTP Sultra di Kota Kendari dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, LBH-Kendari, Kejaksaan, Kepolisian, Universitas, Pengadilan dan LSM Lokal.
- Audit Partisipatif di Kendari tanggal 19 sd 23 Maret 2018 dan Parepare tanggal 25 sd 29 Maret 2018, kedua kota ini dipilih oleh COWATER.

- Pembahasan awal Ranperda PPA di Kabupaten Maros bersama DPRD dan SKPD terkait, tanggal 13 Maret. Pertemuan ini membahas pentingnya Naskah Akademik dan memberi kesempatan seluruh stakeholder yang hadir untuk memberikan masukan terhadap *draft* Ranperda PUG. Pasca kegiatan ini, tim pansus akan melaksanakan studi banding ke DPRD Kota Surabaya. Rapat ini difasilitasi oleh Prof. Syahrudin.
- Pembahasan final MoU Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-SPPKTP) Sultra dilaksanakan di Same Hotel Makassar pada tanggal 14 Maret lalu dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi Agama serta Akademisi dan Lembaga Bantuan Hukum Kendari.



Pada tanggal 24 Maret, BaKTI bersama jaringan NGO di Makassar memperingati Hari Perempuan Internasional di Benteng Rotterdam. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 kegiatan utama, yakni *talkshow*, diskusi film dan bazaar. Tema besar kegiatan ini adalah Bersinergi Mendorong Pengesahan RRU Penghapusan Kekerasan Seksual. Talkshow menghadirkan narasumber Lusia Palulungan, Program Manajer Program MAMPU-BaKTI, Meisy Papayungan, Kepala UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Provinsi Sulawesi Selatan, dan Andi Sri Wulandani, Masika (Majelis Sinergi Kalam) ICMI Makassar. Pada kesempatan ini pula, Deklarasi Dukungan Pengesahan RRU Penghapusan Kekerasan Seksual oleh perwakilan lembaga dan komunitas mitra. Kemudian dilanjutkan dengan Diskusi dan Pemutaran film *Posesif*. Sebuah film yang menceritakan bagaimana kekerasan diproduksi dan direproduksi. Diskusi menghadirkan Iyan Afriyani, seorang psikolog, Sartika Nasmar, aktivis dari lembaga Samsara, dan Fajar Waksi dari Aliansi Remaja Independen Sulawesi Selatan.

## Sub Office BaKTI (Kabupaten Lombok Timur)

- Mentoring *Technical Assistance* (TA) kepada Kelompok konstituen di Lombok Timur, yang dilaksanakan 26 Januari lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis – jenis kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan/anak dan cara penanganannya, dan juga mengidentifikasi calon paralegal yang ada di kelompok Konstituen Kelurahan Tanjung.
- Diskusi forum media di Kabupaten Lombok Timur tanggal 26 Januari lalu. Dalam diskusi ini membahas tentang perubahan pola pikir serta sudut pandang dalam penulisan berita (setelah dilakukan pelatihan jurnalis) sehingga lebih sensitif gender dan lebih berimbang. Juga untuk mengurai kendala yang ditemui para jurnalis khususnya media harian terkait dengan tuntutan berita yang harus “fresh” sehingga seringkali pemberitaan suatu kasus tidak bisa secara tuntas.



- Kunjungan DFAT ke Lombok Timur tanggal 25 Februari. Kegiatan ini mendiskusikan tentang :

1. Penguatan kelompok Konstituen dalam melakukan advokasi dana desa, terlibatnya perempuan dalam kegiatan di desa serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada musyawarah desa
2. Penerapan Metode Reses Partisipatif oleh anggota legislative baik APP (Anggota Parlemen Perempuan) maupun APL (Anggota Parlemen Laki-laki). Beberapa usulan dalam reses tersebut telah terealisasi, seperti bantuan mesin yang diberikan oleh Ketua DPRD
3. Keterlibatan KK dalam penanganan kasus baik KtA dan KtP. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka aduan dan proses layanan ke P2TP2A oleh KK.
4. Dihasilkannya Peraturan Daerah bidang Pendidikan Tentang Mata Pelajaran Muatan Lokal, dimana didalamnya termuat tentang Gender. Sebelumnya peraturan ini mengalami hambatan dan telah disusun dalam waktu yang cukup lama. Namun melalui program MAMPU, BaKTI berjejaring dengan NGO lainnya dan mengawal Perda tersebut hingga dapat di sahkan pada tanggal 5 Desember 2017.



Peringatan International Woman's Day di Kabupaten Lombok Timur tanggal 10 dan 19 Maret. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik perkawinan anak adalah satu bentuk kekerasan dan merupakan pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak. Juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk

menjadikan P2TP2A sebagai pusat rujukan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Lombok Timur.

- Pelatihan penyusunan peraturan desa dan penyusunan draft Peraturan Desa Kembang Kerang (kab. Lombok Timur) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 15 - 16 Maret. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta akan pentingnya perlindungan bagi korban KtP/A di Desa/tingkat komunitas. Selain itu agar draft Raperdes tentang perlindungan perempuan dan anak di Desa Kembang Kerang dapat tersusun.

## **MITRA DAERAH**

**(YKS-TanaToraja, YLP2EM-Parepare, Arika Mahina-Kota Ambon, RPS-Kendari, PPSE-Belu)**

- Kegiatan Pendampingan oleh Community Organizer Sub Mitra ke kelompok Konstituen, dengan tujuan memberikan pendampingan kepada kelompok konstituen dalam melaksanakan kegiatan advokasi dan pendampingan kasus.
- Pembahasan draft MoU P2TP2A di Kabupaten Belu tanggal 28 Februari
- Pembahasan SOP P2TP2A Kota Parepare dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.
- Peringatan International Woman's Day di Kabupaten Belu tanggal 5 dan 8 Maret di Kota Ambon tanggal 19 - 31 Maret, di Kota Parepare tanggal 10 Maret 2018, Kota kendari tanggal 11 Maret dan Kabupaten Tana Toraja Tanggal 11 Maret. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Program MAMPU yang dikelola oleh Sub Mitra BaKTI dengan Pemerintah Daerah.



## Program Kerja Sama UNICEF-BaKTI

### Lokakarya Advokasi Penganggaran Desa Sehat Melalui Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bone Bone



Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen mewujudkan layanan akses air minum aman dan sanitasi layak bagi seluruh lapisan masyarakat dalam tahun 2019. Kebijakan dan langkah dan strategis yang dilaksanakan untuk mempercepat pencapaiannya antara lain dengan mengembangkan program Kabupaten/Kota Sehat yang menargetkan ketersediaan akses 100% air minum, 0% pemukiman kumuh dan 100% sanitasi dapat tercapai dalam 2019 di semua daerah.

Sebagai bentuk dukungan atas komitmen tersebut, Unicef dan BaKTI melalui program WASH (Water, Sanitation and Hygiene) bersama pemerintah Pemprov Sulawesi Selatan melaksanakan pendampingan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2013. Fokus utamanya mengembangkan program sekaligus penguatan kapasitas POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Pada tanggal 16 – 17 Januari 2018 bertempat di Hotel Sarlim Watampone, Kabupaten Bone, Unicef dan BaKTI melaksanakan Lokakarya Advokasi Penganggaran Desa Sehat melalui dana Dana Desa di Kabupaten Bone. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong peran aktif peserta dari tim Pokja AMPL kabupaten, tim Kabupaten Sehat, kepala desa dan perangkat desa dalam mengembangkan strategi membangun desa sehat yang didukung oleh anggaran Dana Desa atau sumber-sumber pembiayaan potensial lainnya yang ada di Kabupaten Bone.

Lokakarya ini diikuti oleh 38 peserta (19 laki-laki; 19 perempuan) terdiri perwakilan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Forum Kabupaten dan Kecamatan Sehat, Kepala Desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris desa dan aktifis sanitarian. Output lokakarya ini adalah rumusan 6 program desa sehat yang telah disusun oleh tim, kesepakatan integrasi kegiatan program desa sehat ke dalam RPJMDesa dan RKPDesa, dan kesepakatan alokasi anggaran operasional pokja desa sehat.

**Kegiatan lanjutan dari Lokakarya ini adalah Focus Group Discussion (FGD)/ Diskusi Kelompok Terarah.** Peserta kegiatan ini adalah desa yang telah mengikuti kegiatan Lokakarya Advokasi Penganggaran Desa Sehat melalui Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan sebelumnya. FGD ini dilaksanakan 17 Maret lalu di Desa Tanete Harapan, Kec. Cina, Kab. Bone. Diikuti oleh 12 peserta (7 laki-laki; 5 perempuan) terdiri dari 10 orang dari tiga desa (Desa Tanete Harapan, Kanco dan Cinennung) serta 2 orang dari Dinkes Bone (Kabid dan Kasi Kesehatan Lingkungan). Kegiatan ini bertujuan untuk mereview *draft* program desa sehat yang disusun oleh desa peserta workshop; melakukan *assessment* partisipatif mengenai masalah pokok air minum, sanitasi dan kebutuhan warga desa yang menjadi dasar dari *draft* program desa sehat yang telah dirumuskan; serta membahas rasionalitas usulan anggaran setiap kegiatan program desa sehat dan kesesuaiannya dengan nomenklatur program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyedia anggaran.

Hasil Diskusi: Ketiga desa yakni Desa Tanete Harapan, Desa Kanco, dan Desa Cinennung menyelesaikan rumusan program Desa Sehat yang berisi sejumlah kegiatan AMPL yang telah siap dilaksanakan dalam 2018-2019 dan didanai dengan dana Alokasi Desa Sehat dan APBDDesa. Desa Tanete Harapan, Desa Kanco, dan Desa Cinennung dijadikan model pengembangan program desa sehat, tiga desa ini menyetujui dan menyediakan anggaran mulai 150 – 250 juta untuk kegiatan AMPL yang akan direalisasikan dalam tahun 2018. Selain itu, menetapkan setiap kegiatan AMPL dalam program Desa Sehat berdasarkan hasil *assesment* yang dielaborasi kembali secara rinci selama sesi diskusi dalam FGD.

### **Pertemuan Penguatan Pengelolaan Data Sanitasi Sekolah dalam Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah Dasar di Sulawesi Selatan**

Data sanitasi sekolah sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2016, 35% sekolah tidak memiliki sumber air bersih yang cukup. 12% sekolah tidak memiliki toilet dan 31% sekolah tidak memiliki toilet yang layak. Pada jenjang sekolah dasar (SD), data statistik Direktorat Jenderal Pusat Data dan Statistik (Pusdadik) Kemdikbud pada pertengahan 2017 jumlah kecukupan terhadap air bersih baru mencapai 84,51 % dan 15,49% bahkan belum memiliki akses air bersih. Penting untuk ketersediaan analisis data sanitasi sekolah dalam Dapodik, agar dapat dijadikan rujukan perencanaan peningkatan kualitas sanitasi di sekolah, khususnya satuan pendidikan dasar SD dan SMP.

Dalam rangka mendukung ketersediaan data tersebut, Unicef dan BaKTI bekerjasama dengan Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Pertemuan Penguatan Pengelolaan Data Sanitasi Sekolah dalam Sistem Dapodik Sekolah Dasar, 22 Februari lalu di Hotel Remy Makassar.

Kegiatan ini diikuti oleh 39 peserta (laki-laki 32; 7 perempuan) yang berasal dari sembilan kabupaten yakni Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Barru, Sidrap, Wajo, Luwu Utara, Toraja dan Toraja Utara. Peserta merupakan perwakilan unsur Kabid Dikdas SD, Kabid Program, Kabid Sarana Prasarana, operator Dapodik Dinas Pendidikan, dan operator sekolah.

Hasil yang dicapai antara lain:

1. Teridentifikasi Penanggung jawab pengelolaan DapodikDas (Data Pokok Pendidikan Dasar) dari Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten terdiri dari unsur KaBid Dikdas, Kabid Perencanaan Program, Kabid Sarana, Operator Dapodik, Operator Sekolah berpartisipasi aktif selama kegiatan pertemuan berlangsung.
2. Peserta mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru tentang pentingnya sanitasi sekolah, manajemen data sanitasi dan pemanfaatannya.
3. Peserta menjadi lebih peduli dan memahami dengan baik tentang item-item pertanyaan sanitasi sekolah dalam Dapodik yang harus terus diperbaharui oleh operator sekolah.
4. Tersedianya Baseline data sanitasi sekolah dari delapan kabupaten peserta

### **Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Kota Makassar**

Guna mereview dan merencanakan peningkatan kualitas pelayanan PPKAI untuk kesejahteraan sosial anak secara komprehensif maka pertemuan koordinasi perlu dilakukan secara berkesinambungan. Sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan koordinasi sebelumnya, Bappeda Kota Makassar memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor. Bappeda didukung oleh Unicef dan BaKTI menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor PPKAI Kota Makassar pada tanggal 23 Februari lalu. Kegiatan ini diikuti oleh 47 orang peserta (laki-laki 27 orang, perempuan 20 orang) berasal dari OPD terkait di Kota Makassar.

Tujuan kegiatan yaitu mendiskusikan pencapaian PPKAI Kota Makassar selama tahun 2017, mendiskusikan dan finalisasi draft *focal point*, serta mendiskusikan pencapaian Rencana Tindak Lanjut yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya. Dan mendiskusikan tantangan dan strategi penanganannya, serta pemaparan hasil data penjangkauan PPKAI Kota Makassar.

### **Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Gowa**

Unicef melalui Yayasan BaKTI bersama Pemerintah Kabupaten Gowa telah mendukung dan memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor untuk membahas kemajuan/capaian, data hasil penjangkauan anak rentan, tantangan, hambatan dan sumbatan. Pertemuan koordinasi PPKAI Gowa dilakukan secara bertahap, tahap pertama membahas analisis sumbatan dan strategi teori perubahan. Tahap 2 membahas program kerja integratif dan alur rujukan penanganan anak yang dijangkau maupun melalui aduan.

Pertemuan pertama difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Gowa, dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Tim PPKAI, PUSPAGA, Peksos dan LPA Kabupaten Gowa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 di Gowa,

dengan peserta sejumlah 19 orang (laki-laki 7 orang, perempuan 12 orang). Output kegiatan adalah teridentifikasinya sumbatan-sumbatan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif di Kabupaten Gowa, serta tersusun rekomendasi strategi sebagai referensi mengatasi sumbatan untuk mendukung pencapaian pelayanan kesejahteraan anak integratif yang optimal, cepat, tepat dan tuntas.

Pertemuan koordinasi tahap dua, mereview capaian hasil PPKAI dan program kerja integratif yang mendukung pengelolaan kegiatan PPKAI sehingga kualitas pelayanan yang diberikan terus meningkat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2018 di Gowa, dengan peserta sejumlah 55 orang (laki-laki 26 orang, perempuan 29 orang).

Output kegiatan ini adalah pencapaian PPKAI termasuk hasil penjangkauan dan solusi untuk merespon hasil penjangkauan didiskusikan. Hasil analisis sumbatan dan teori perubahan PPKAI Kabupaten Gowa dipresentasikan dan menjadi referensi pengembangan PPKAI Gowa. Disepakatinya rumusan program Integratif PPKAI yang berbasis klaster wilayah dan permasalahan anak yang ditangani.

### **Pelatihan dan Pengembangan Sistem Database Kerentanan Anak Melalui Website dan Pengumpulan Data Melalui Aplikasi Mobile (*Data Entry*) Makassar, 1-2 Maret 2018**

Guna mendukung pemerintah Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dalam mengembangkan sistem data base berbasis web dan pengumpulan data anak melalui aplikasi android, Unicef dan BaKTI, memfasilitasi stakeholder penyedia layanan kesejahteraan sosial anak di kota/kabupaten tersebut melalui kegiatan *Pelatihan dan Pengembangan Sistem Data Base Kerentanan Anak Melalui Website dan Pengumpulan Data Melalui Aplikasi Mobile*.

Pelatihan berlangsung selama dua hari (1-2 Maret) diikuti 56 orang peserta (31 laki-laki; 25 perempuan). Fasilitator menyajikan materi pengenalan akses untuk website pusat rehabilitasi sosial anak dan aplikasi mobile ONA Collect yang digunakan untuk survey dan penginputan data.

### **Pertemuan Koordinasi Petugas *Frontline* PPKAI Kota Makassar dan Kabupaten Gowa Tahap II**

Untuk memperkuat keterampilan dan keahlian para pekerja sosial dan Sakti Peksos, maka Unicef melalui Yayasan BaKTI bekerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi Sakti Peksos sebagai *frontliner* PPKAI Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Sakti Peksos sebagai petugas *frontline* PPKAI dalam melakukan *assesmen* anak rentan dan berisiko, beserta keluarganya. Memberikan input perbaikan terhadap formulir *assessment* yang ada, sehingga format *assesment* lebih sederhana dan implemetatif. Kegiatan ini dihadiri 20 orang peserta (laki-laki 6 orang, perempuan 13 orang).

## Inovasi Transportasi Publik Kota Makassar: PASIKOLA



Untuk menjamin keberlangsungan Pasikola, selama masa ujicoba Dinas Perhubungan selaku leading sector telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan berbagai pihak sehubungan dengan payung hukum Pasikola. Setelah melalui beberapa kali pertemuan, lahirlah rancangan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Antar Jemput Pasikola. Rancangan Perwali ini telah melalui setidaknya enam kali revisi kemudian uji publik pada tanggal 30 Januari 2018 sebelum disahkan oleh Walikota Makassar pada awal Februari 2018. Uji coba masih terus berlangsung selama periode Januari – April 2018. Untuk memaksimalkan layanan Pasikola, saat ini sedang diujicoba penambahan frekuensi antar jemput dimana satu unit Pasikola akan melayani 2 kali pengantaran dan penjemputan. Berarti jumlah siswa yang dilayani satu unit Pasikola menjadi minimal 20 siswa. Harapannya penambahan ini akan mulai dilakukan setelah tahun ajaran baru. Pada akhir April 2018, pengelolaan Pasikola akan dialihkan secara bertahap ke Dinas Perhubungan Kota Makassar.

## MELAYANI - Mengurai Permasalahan Perbaikan Layanan Dasar di Indonesia



Setelah 4 bulan inisiatif ini berjalan, 3 Kabupaten program MELAYANI sepakat untuk melakukan tukar pengalaman dan menarik pelajaran dari penyelenggaraan layanan dasar di masing-masing daerah. Sebagai tuan rumah pertama proses tukar pengalaman ini adalah Kabupaten Bojonegoro. Dalam pertemuan “tukar pengalaman” yang diselenggarakan tanggal 12-13 Februari 2018 dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Dr. Suyoto atau biasa dipanggil Kang Yoto. Sementara delegasi dari Kabupaten Belu NTT dipimpin langsung oleh Bupati Willy Lay, didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Marsianus. Sedangkan dari Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Berli, didampingi oleh Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA, Faisal Hadi Djaya. Selain itu hadir pula perwakilan dari Bank Dunia selaku mitra internasional dalam pelaksanaan program MELAYANI serta para pendamping (Coach) program MELAYANI di tiap kabupaten wilayah kerja MELAYANI. Bojonegoro terpilih sebagai tuan rumah “tukar pengalaman” mengingat pengalaman Bojonegoro dalam melakukan beberapa program inovasi perbaikan pelayanan dasar. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Program MELAYANI, kunjungi: <http://www.batukarinfo.com/melayani>

## **Program Landasan II**

### **Pelatihan dan Pendampingan MBS (Managemen Berbasis Sekolah)**

Merupakan peningkatan kapasitas kepada semua unsur satuan di sekolah-sekolah yang berada di daerah intervensi program Landasan II. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun struktur manajemen terpadu pada tingkat Sekolah Dasar dalam peningkatan mutu sekolah, Meningkatkan pelaksanaan MBS di tingkat sekolah dengan baik dan benar serta mampu melaksanakan perencanaan penganggaran yang terintegrasi dan partisipatif dengan Kampung. Pada periode ini telah dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Kaimana, Sorong, Asmat, Nabire, Lanny Jaya.

### **Pelatihan TUPOKSI Aparat Kampung**

Kegiatan ini merupakan upaya Program Landasan II dalam memperkuat pemahaman Pemerintahan Kampung tentang pengelolaan sistem Pemerintah Kampung, tugas pokok Aparatur Kampung dan BAMUSKAM, serta kemampuan dalam menyusun peraturan kampung sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kampung dalam mengelola pemerintahannya dan juga sebagai proteksi bagi pelaksana pemerintahan kampung itu sendiri. Selain itu kegiatan juga ,eningkatkan pemahaman yang terintegrasi tentang perencanaan dan penganggaran reguler pada tingkat kampung. Kegiatan melibatkan aparat pemerintahan kampung dan BAMUSKAM. Pada periode ini kegiatan telah dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Asmat, Jayapura, Sorong, Waropen, Nabire, Kaimana, Lannya Jaya.

### **Pendampingan Sistem Informasi Administrasi Kampung (SAIK)**

Merupakan sebuah kegiatan pendampingan dalam penginputan data pada instrumen yang aplikatif yang diberikan kepada kader pemberdayaan kampung melalui penyusunan Profil Kampung berbasis data yang akurat. Sehingga hasil dari pengimputan data SAIK dapat berdampak kepada prioritas program kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan dan HIV.

Salah satu tujuan program yang didorong oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah memberikan layanan kesehatan yang prima dimana salah satunya dengan diakreditasinya Puskesmas. Diharapkan dengan Puskesmas, layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah pelaksanaan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Terpadu. Program Landasan II telah membantu mendampingi untuk penyusunan PTP terpadu, diharapkan perencanaan yang dihasilkan dalam pelatihan merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pada periode ini kegiatan telah dilaksanakan di Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 24 - 26 Januari 2018 dan di Kabupaten Waropen pada tanggal 31 Jan - 2 Feb 2018. Dengan jumlah tenaga kesehatan yang dilatih sebanyak 212 Orang (18 Laki-laki dan 28 Perempuan) dan telah menghasilkan 5 Dokumen PTP yang siap dilaksanakan.

### **Pelatihan Management Puskesmas**



Melalui kegiatan ini, petugas kesehatan mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya manajemen puskesmas untuk peningkatan layanan dasar kesehatan serta mengimplementasikan faktor-faktor yang menunjang manajemen puskesmas yang efektif dan efisien. Sehingga dapat membantu tercapainya akreditasi puskesmas. Pada periode ini sebanyak 26 Puskesmas telah mendapatkan pelatihan dan pesertanya menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Pusat Pelatihan Kesehatan (BPPK). Sertifikat tersebut merupakan salah satu poin penilaian puskesmas untuk proses akreditasi. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 44 orang (21 Laki-laki dan 23 Perempuan).

Pelatihan Kader tentang HIV dan AIDS merupakan penguatan sistem dan keterlibatan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang menjadi salah satu komponen utama program LANDASAN II, pelatihan kader ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Karena HIV dan AIDS telah meluas sampai ke masyarakat miskin di kampung-kampung yang bahkan belum mengenal dunia luar. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 17 - 19 Januari 2018 dengan peserta 23 laki-laki dan 6 perempuan yang terdiri dari kader pemberdayaan masyarakat kampung.

Pada periode ini program telah memproduksi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang HIV dan AIDS untuk meningkatkan jumlah *testing* di tingkat kampung. Produk yang dihasilkan berupa poster, brosur dan buku panduan yang telah sesuai dengan konteks lokal yang akan dipergunakan dalam promosi pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS. Produk komunikasi tersebut telah melewati tahap ujicoba yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong, Jayapura dan Lanny Jaya pada tanggal 24 Januari 2018 dengan jumlah peserta 29 laki-laki dan 7 perempuan yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, wartawan, aktifis HIV dan AIDS, LSM dan OPD terkait.

### **Semiloka pengembangan strategi pencegahan gizi buruk Kab. Asmat**

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Melakukan *sharing* pengalaman dari pemerintah kabupaten dan berbagai pihak yang telah memiliki pengalaman bekerja di Asmat;
2. Membangun strategi penanggulangan gizi buruk dan kesehatan lingkungan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan secara terintegrasi di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 - 20 Maret 2018 dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Asmat (Pimpinan Daerah, OPD terkait, DPRD), Pemerintah Provinsi Papua, Universitas Cenderawasih dan Pemerintah Pusat (Bappenas dan Kemendagri), Keuskupan Agats, Tokoh Adat dan NGO dengan total jumlah peserta 143 orang (110 laki-laki dan 33 perempuan)

Hasil dari kegiatan ini adalah adanya strategi penanggulangan gizi buruk dan kesehatan lingkungan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan secara terintegrasi di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.

### **Program KIAM Guru - Kinerja dan Akuntabilitas Guru**

#### **Aspek Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

1. Mulai awal tahun 2018, Forum Peduli Pendidikan tidak lagi dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Hal ini berhubungan dengan proses verifikasi 3 bulanan yang saat ini telah dialihkan langsung di tingkat kabupaten.
2. Penguatan terhadap kemampuan pemangku kepentingan untuk strategi keberlanjutan telah dilaksanakan dalam periode Februari-April 2018 (Pelatihan Tata Kelola):
3. Di Sintang, pelatihan tata kelola dibagi menjadi 8 gelombang dan dilakukan secara berturut-turut mulai dari pertengahan Februari 2018 sampai dengan awal April 2018. Setiap gelombang pelatihan memakan waktu empat hari.
4. Di Ketapang, pelatihan tata kelola dibagi menjadi 2 gelombang, dengan masing-masing gelombang dilakukan secara paralel dengan dibagi menjadi 3 kelas. Gelombang pertama

telah dilakukan bulan Maret, dan gelombang kedua akan dilaksanakan pertengahan April 2018.

5. Di Landak, pelatihan tata kelola dibagi menjadi 3 gelombang, dengan masing-masing gelombang dibagi menjadi 2 kelas. Dua gelombang telah dilakukan pada bulan Maret 2018. Gelombang terakhir akan dilakukan di awal April 2018.
6. Di Manggarai Timur, pelatihan tata kelola dilakukan dari bulan Maret sampai dengan awal April 2018. Pelatihan dibagi menjadi 3 gelombang dengan masing-masing gelombang memiliki satu kelas. Gelombang terakhir akan dilakukan di awal April 2018.
7. Di Manggarai Barat, pelatihan tata kelola dilakukan dari bulan Maret sampai dengan awal April 2018. Pelatihan dibagi menjadi 3 gelombang dengan masing-masing gelombang memiliki satu kelas. Gelombang terakhir akan dilakukan di awal April 2018.

### **Aspek Implementasi Pembayaran berdasarkan Kehadiran atau Kualitas Layanan**

1. Per awal Maret 2018, penilaian bulanan untuk bulan Januari dan Februari 2018 telah dilakukan di semua 203 desa.
2. Sedangkan penilaian bulan Maret 2018 dilakukan di 202 sekolah. Terdapat informasi bahwa salah satu sekolah di Kab. Manggarai Timur, SDK Puntu (Kelompok Pendekatan 3), telah tidak melakukan penilaian sama sekali mulai bulan Maret 2018 dikarenakan adanya konflik—dimana potensi tersebut telah ada dari awal—antara satu anggota KPL dengan guru.
3. Mekanisme pengiriman data hasil penilaian untuk tahun 2018 telah diperpendek dimana pelaporan dikirim dari tingkat sekolah langsung ke kabupaten. Verifikasi 3 bulanan juga dilakukan di tingkat kabupaten dengan melibatkan pengawas. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat waktu pelaporan sehingga pembayaran tunjangan khusus tidak terlambat. Pengecualian untuk Ketapang dimana pengiriman hasil penilaian kepada dinas dilakukan melalui pengawas sekolah dan telah diatur dalam Perbup.
4. Pembayaran tunjangan khusus untuk triwulan IV tahun 2017 baik untuk guru PNSD maupun bukan PNS telah dilakukan pada Desember 2017. Ditemukan terjadinya kekurangan pembayaran untuk 1 bulan pada triwulan IV/2017 di Ketapang dan Manggarai Barat sebanyak 12 orang guru, yaitu 5 guru di Ketapang (3 guru PNSD dan 2 guru bukan PNS) dan 7 guru di Manggarai Barat (4 guru PNSD dan 3 guru bukan PNS). Hal ini diduga diantaranya karena persoalan teknis dimana yang dikaitkan dengan penilaian memang hanya 2 bulan (Oktober dan Nopember) sehingga bisa saja terlewat 1 bulan. Selain itu, tenggat waktu penerimaan laporan hasil penilaian adalah 30 November sehingga belum semua sekolah mampu memenuhinya. Perbaikan pembayaran dipertimbangkan akan dilakukan pada pembayaran TK I 2018.
5. Pembayaran untuk Triwulan I tahun 2018 masih belum bisa dilakukan karena SKTK (Sertifikat Keterampilan Kerja) guru penerima TKG belum diterbitkan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Selain itu verifikasi oleh dinas sebelum dilakukan

penetapan hasil penilaian juga direncanakan baru akan selesai dilakukan di Kabupaten per 10 April 2018.

### **Aspek Tata Kelola dan Regulasi**

1. Perjanjian Kerjasama sebagai perpanjangan MoU untuk pelaksanaan program rintisan KIAT Guru di tahun 2018 telah ditandatangani oleh PLT Dirjen GTK, TNP2K dan Bupati di 4 kabupaten rintisan selain Kabupaten Landak. PK sedang proses menunggu tanda tangan dari Bupati yang diketahui sedang cuti saat ini.
2. Persesjen sebagai perpanjangan Perdirjen untuk payung hukum program rintisan KIAT Guru tahun 2018 saat ini sedang menunggu tanda tangan dari Sesjen Kemdikbud.
3. Finalisasi Peraturan Bupati terkait Pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru Tahun 2018 telah dilaksanakan untuk 5 Kabupaten Rintisan. Peraturan Bupati telah diterbitkan di Manggarai Barat sedangkan dokumen tersebut masih dalam proses penetapan di 4 kabupaten lainnya.
4. Tenggat waktu pengusulan guru penerima TKG oleh dinas pendidikan ke Dirjen GTK adalah tanggal 25 Maret 2018, namun sampai dengan minggu ke-2 Maret 2018 masih terdapat 180 (15%) dari 1187 guru peserta yang mempunyai NUPTK di 267 SD rintisan KIAT Guru yang belum masuk sebagai nominasi penerima SKTK Semester I 2018 sehingga dinas pendidikan belum bisa mengusulkan melalui SIMTUN. Kondisi ini disebabkan diantaranya oleh terlambatnya sekolah melakukan pemutakhiran data guru dalam Dapodik dan sinkronisasi Dapodik dari sekolah ke server pusat masih membutuhkan waktu.
5. Daftar detil guru peserta rintisan KIAT Guru, termasuk yang belum mendapatkan nominasi, telah disampaikan ke Dirjen GTK. Terutama untuk guru yang belum masuk nominasi agar ditindaklanjuti guna memastikan guru-guru tersebut menerima SKTK. Tim Pelaksana Nasional dan Koordinator Lapangan juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Operator SIMTUN kabupaten untuk memitigasi kondisi tersebut.

### **Aspek Penelitian**

1. Tes Cepat kemampuan dasar murid telah dilakukan di 203 (100%) SD Rintisan dengan seluruh data telah terkumpulkan. Berdasarkan hasil Tes Cepat Kemampuan Dasar Murid yang dilakukan oleh Kader dan KPL tersebut, 40% murid telah memiliki kemampuan dasar Bahasa Indonesia dan 42% murid telah memiliki kemampuan Matematika sesuai dengan kelasnya dibandingkan pada saat survei awal di bulan Oktober-November 2016 dimana hanya 1% murid yang memiliki kemampuan Bahasa Indonesia dan 4% murid yang memiliki kemampuan Matematika sesuai dengan kelasnya.
2. Data Survei Kehadiran Guru telah dianalisa dimana ditemukan indikasi meningkatnya tingkat kehadiran guru di sekolah dari 75% di akhir 2016 (baseline) menjadi 79% di akhir

2017 (SKF FM). Selanjutnya, tingkat kehadiran murid meningkat dari 87% di akhir 2016 menjadi 90% di akhir 2017. Oleh karena itu, persentase kelas tanpa guru ditemukan menurun dari 25% di akhir 2016 menjadi 13% di akhir 2017. Data ini telah dipaparkan sebagai materi pelatihan tata kelola kepada pemangku kepentingan desa dan sekolah.

3. Saat ini Tim Daerah sedang mengumpulkan data pemetaan keanggotaan dan keaktifan kader dan KPL beserta variasi fasilitasi pertemuan di tingkat desa yang selama ini terjadi.

Survei endline kuantitatif maupun kualitatif telah dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2018. Dalam pelaksanaannya, Tim Survei aktif berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Daerah maupun Nasional untuk mengatur jadwal antara pelaksanaan survei dengan pelatihan Tata Kelola yang sedang berlangsung.

### **Beberapa Kegiatan Implementasi Yang Dilaksanakan Pada Periode Januari – Maret 2018**

1. **Lokakarya dan Pelatihan Nasional Tim Pelaksana Daerah diselenggarakan oleh TNP2K bersama dengan Yayasan BaKTI dan Bank Dunia pada tanggal 7-12 Januari 2018 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.** Lokakarya ini bertujuan untuk: (a) Menyampaikan informasi mengenai desain penutupan proyek dan rencana kerja tim nasional tahun 2018 termasuk rencana pengumpulan data dan informasi; (b) Menyelesaikan rencana kerja daerah bulan Januari sampai Mei 2018; (c) Melatih Tim Daerah agar dapat melakukan Pelatihan bagi kader desa (dengan pendekatan ToT) untuk memfasilitasi evaluasi janji layanan dan tanggung-jawab KPL dan Kader agar tetap dapat melaksanakan penilaian bulanan setelah FM tidak lagi mendampingi; (d) Mendapatkan informasi dan data untuk penelitian dan implementasi di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten; dan (e) Membahas kelengkapan dokumen untuk PJUM kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Tim Nasional KIAT Guru yang berjumlah 24 orang, seluruh Tim Daerah KIAT Guru yang berjumlah 55, dan fasilitator dari Yayasan BaKTI sejumlah 8 orang dan 5 orang dari Bank Dunia.



2. **Survei Akhir (Endline) diselenggarakan oleh Bank Dunia dengan dukungan teknis dari TNP2K.** Survei akhir dilakukan untuk menilai efektivitas program rintisan KIAT Guru dengan mengkaji dampak kegiatan terhadap kehadiran dan kualitas layanan guru dan hasil belajar murid di 270 SD Rintisan. Survei akhir dilakukan untuk data kuantitatif maupun kualitatif.

Kegiatan survei akhir kuantitatif mencakup pengumpulan data di tingkat Sekolah Dasar, tes kemampuan siswa, kegiatan dengan guru dan orang tua murid, dan wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, Kepala Desa, Kelompok Pengguna Layanan dan orang tua murid. Survei akhir kuantitatif dilakukan selama satu setengah bulan dimulai dari awal Februari (5 Februari 2018) sampai dengan pertengahan Maret (27 Maret 2018). Dalam mempersiapkan pelaksanaan survei akhir tersebut, tim TNP2K-KIAT Guru turut mendampingi Tim Bank Dunia dalam uji coba instrumen *Student Learning Assessment* (SLA) dan pelatihan Tim Survei. Uji coba instrumen SLA dilakukan pada tanggal 25-27 Januari 2018 di Pontianak. Data survei kuantitatif yang dikumpulkan diperkirakan siap untuk dianalisa per akhir April 2018. Selanjutnya, kegiatan survei kualitatif telah dilakukan dari tanggal 19 Feb sampai dengan 10 Maret di 9 desa kasus yang sama dengan dua kunjungan sebelumnya.

- 3. Lokakarya Regional Finalisasi Peraturan Bupati diselenggarakan oleh Ditjen GTK – Kemdikbud bersama dengan TNP2K pada tanggal 26 Februari-1 Maret 2018 di Hotel H Sovereign, Denpasar dan pada tanggal 5-8 Maret 2018 di Hotel Mercure, Pontianak.** Lokakarya ini bertujuan untuk menyepakati rancangan akhir regulasi Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru Tahun 2018, yang terdiri dari 3 (tiga)



bagian, yaitu: a) Peraturan Bupati yang berisi berbagai landasan hukum serta klausul terkait pelaksanaan rintisan KIAT Guru tahun 2018, b) Lampiran I berisi Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kehadiran dan Kualitas Layanan Guru dan Kepala Sekolah Peserta, dan 3) Lampiran II tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Khusus Guru dan Kepala Sekolah Peserta. Kegiatan ini diikuti oleh 14 perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur untuk kegiatan Regional Nusa Tenggara Timur dan 21 perwakilan Pemerintah Daerah Ketapang, Landak dan Sintang untuk kegiatan Regional Kalimantan Barat. Proses kegiatan difasilitasi oleh Tim Pelaksana Nasional KIAT Guru dan 5 Koordinator Lapangan KIAT Guru dengan pendampingan dari Kemdikbud-GTK. Setelah pembahasan peraturan dan lampirannya, peraturan akan kembali dikaji di masing-masing Kabupaten sambil menunggu Persekjend yang masih dalam proses pengajuan.

4. **Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola berlangsung di 5 Kabupaten Rintisan.** Sebagai bentuk tindak lanjut arahan Ketua Tim Koordinasi Nasional Program Rintisan KIAT Guru untuk merumuskan strategi keberlanjutan program KIAT Guru di tahun 2018, dilakukan dua jenis pelatihan kepada pemangku kepentingan desa dan sekolah di masing-masing 5 Kabupaten Rintisan. Salah satunya adalah Pelatihan Tata Kelola yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Kader, KPL, Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Pemerintah Desa untuk bekerja sama dalam melanjutkan kegiatan penilaian layanan guru secara mandiri agar perubahan baik yang dialami selama ini terhadap pendidikan terus meningkat. Kegiatan ini telah berjalan sejak bulan Februari sampai dengan pertengahan April 2018.



5. **Knowledge Sharing KIAT Guru diselenggarakan pada 16 Maret 2018 di Kantor Bank Dunia Jakarta.**

Tujuan dari kegiatan ini adalah berbagi pengetahuan terkait instrumen *Student Learning Assessment* yang digunakan oleh masyarakat di desa Rintisan KIAT Guru. Materi dalam kegiatan ini disampaikan oleh Tim dari KIAT Guru-TNP2K. Kegiatan ini dihadiri sekitar 30 peserta dari berbagai organisasi dan mitra pembangunan di bidang pendidikan. Kegiatan ini juga merupakan sesi pertama dari rangkaian Brown Bag Lunch KIAT Guru yang direncanakan akan dilakukan hingga Juni 2018 sebagai wadah pembagian pengetahuan terkait mekanisme rintisan maupun temuan sementara dari pelaksanaan rintisan KIAT Guru.

## Program BANGGA Papua



BaKTI mendukung Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan sebuah program perlindungan sosial bernama BANGGA Papua. BANGGA – yang didukung oleh KOMPAK dan MAHKOTA ini – merupakan singkatan dari Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera. BANGGA Papua bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan anak orang asli Papua yang berusia dibawah empat tahun. Dengan menggunakan dana otsus, Pemprov Papua akan memberikan dana untuk setiap anak sebesar Rp 200.000 per bulan.

Tugas utama BaKTI adalah menyusun strategi komunikasi, memproduksi *mock-up* materi-materi komunikasi, menyusun modul *training of trainer* (ToT) untuk meningkatkan kapasitas komunikasi Sekretariat Bersama (Sekber) Provinsi dan Kabupaten, dan melakukan ToT.

### **Assesment dan Pengumpulan Data**

- Dilakukan di Jayapura dan tiga kabupaten uji coba, yaitu Asmat, Lanny Jaya dan Paniai.
- Tujuan assesment adalah untuk memperoleh data/informasi terkait cara dan kebiasaan masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi, serta konteks sosial budaya yang mempengaruhi gaya komunikasi dan interaksi tersebut. Dalam assesment ini, BaKTI berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Sekber Kabupaten, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, akademisi, dinas-dinas terkait dan LSM lokal

### **Penyusunan Strategi Komunikasi**

Hasil *assesment* di bulan Januari dijadikan dasar untuk menyusun strategi komunikasi dan mengembangkan materi-materi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat.

### **Konsultasi Rancangan Strategi Komunikasi**

- Pada awal Februari, BaKTI mengonsultasikan rancangan strategi komunikasi kepada Sekber Provinsi dan Kabupaten, dan mendapatkan banyak masukan.
- BaKTI lalu melakukan revisi untuk mengakomodir masukan-masukan tersebut.

### **Membuat materi-materi komunikasi**

- BaKTI memproduksi *mock-up* empat jenis materi komunikasi yaitu poster, brosur/leaflet, lembar balik dan film animasi.
- Sebagai pegangan anggota Sekber yang melakukan sosialisasi, disiapkan sebuah panduan berisi tanya-jawab seputar program BANGGA Papua.

### **Mendesain Logo BANGGA Papua**

- BaKTI memberikan beberapa alternatif desain logo untuk dipilih oleh Sekber Provinsi.
- Pembuatan desain mengikuti arahan dan permintaan dari Sekber Provinsi.

### **Menyusun Modul ToT**

- Di bulan Februari, BaKTI menyusun modul ToT untuk digunakan meningkatkan kapasitas komunikasi Sekber Provinsi dan Kabupaten.
- Modul “Komunikasi Persuasif” dikonsultasikan kepada KOMPAK dan MAHKOTA.

### **ToT untuk Sekber Provinsi**

- Pada akhir Maret 2018, BaKTI melakukan ToT untuk Sekber Provinsi di Jayapura.
- ToT “Komunikasi Persuasif” membekali anggota Sekber Provinsi ketrampilan komunikasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang. Komunikasi persuasif bertujuan menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Intinya, melakukan sosialisasi, tidak sekedar memberi informasi. Harus mampu membuat audiens paham tentang pesan yang disampaikan dan mempengaruhi mereka.
- Dalam ToT ini juga dilakukan latihan bagi para anggota Sekber untuk menggunakan materi-materi komunikasi yang telah dibuat.
- Hadir dalam ToT ini adalah Ketua Sekber Provinsi, 8 orang anggota Sekber Provinsi dan 2 staf Humas Pemprov.
- ToT diampu oleh Feby Siahaan, seorang jurnalis senior yang adalah juga dosen jurnalistik di IBii, penulis buku, *trainer* media dan komunikasi serta mentor sekolah jurnalistik AJI (Aliansi Jurnalis Independen).

## Program INSPIRASI



INSPIRASI (Indonesia Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif) adalah program 6 bulan yang didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) serta dikelola oleh UnionAID bekerjasama dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan Auckland University of Technology (AUT).

Program ini bertujuan membantu para pemimpin muda dari Indonesia Timur untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri mereka sehingga mereka dapat menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan di masyarakat dan wilayah Indonesia Timur yang lebih luas.

Program ini akan membangun keterampilan riset, evaluasi, presentasi, dan komunikasi peserta, termasuk meningkatkan Bahasa Inggris mereka. Para peserta akan bekerja sama berdasarkan lintas etnis dan agama dan mengambil pendekatan inklusif untuk membangun persatuan, pemahaman, dan kesetaraan di semua lapisan dalam masyarakat. Program ini juga melibatkan organisasi dan individu di Selandia Baru termasuk pemerintah lokal dan pusat, LSM, akademisi dan Māori.

UnionAID dan Yayasan BaKTI menerima 60 aplikasi dari wilayah Sulawesi, Maluku dan NTT untuk mengikuti seleksi program INSPIRASI dan 25 orang kandidat telah terpilih untuk mengikuti Tes dan Interview. 17 orang diantaranya berasal dari pulau Sulawesi dan Maluku dan 8 orang dari Nusa Tenggara Timur. Tanggal 20 April 2018 UnionAID akan mengumumkan 8 orang yang berhasil dan akan mengikuti program INSPIRASI di Selandia Baru.